

**SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF SEBAGAI PENDUKUNG
PENGANGGARAN DI PEMERINTAH DESA MELALUI INTEGRASI SISTEM
DENGAN TEKNOLOGI *WEB SERVICE* DAN APLIKASI SELULER (STUDI
KASUS DESA DERMAJI)**

**EXECUTIVE INFORMATION SYSTEMS AS A SUPPORT OF BUDGETING IN A
VILL GOVERNMENT THROUGH AND CELLULAR APPLICATION
(CASE STUDY OF DERMAJI VILL)**

Trias Bratakusuma¹, Zanuvar Rifai²

^{1,2}Universitas Amikom Purwokerto

Email: trias@amikompurwokerto.ac.id, zanuvar.rifai@amikompurwokerto.ac.id

Abstract

The usage of informatics in this case was e-governement in the government which was included in presidential instructions No.3 2003 was already implemi through regional e-governement that was adjusted based off of local resources and regional needs. The importance of e-governement was affected by at least 3 factor: electronic communication between public sector and society offering both of them a new way to participate and interact. The cyber room in public service makes the deletion of bureaucracy structure and the classic process in E-governement community can improve the service and also offers information on a local level.

Even though the dermaji village government has implemented the e-governement but there's more to delete the old bureaucracy system that was old and complicated. Executive informatics is one of the type of informatics for executive that was used to facilitate informatics need in order to reach the goal of an organization. In the implementation this technology was often time utilized by the Village government for main source of information in supporting decision making, particularly when arranging a weak budget in terms of mechanism and supporting data source. With this system we hope that the decision making in budget arrangement became more objective. The development method in this system was scrum.

Keywords: *e-government, Scrum*

Abstrak

Penggunaan Teknologi informasi dalam hal ini adalah e-government pada pemerintahan di Indonesia sebagaimana menjadi amanah dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 telah diimplementasikan melalui kebijakan e-govemment pemerintah daerah dengan variasi yang disesuaikan dengan local resources dan kebutuhan daerah. Pentingnya e-government paling tidak disebabkan oleh 3(tiga) factor,yaitu: Komunikasi elektronik antara sektor publik dan masyarakat menawarkan bagi keduanya bentuk baru untuk partisipasi dan interaksi. Ruang cyber dalam pelayanan publik memudahkan penghapusan struktur birokrasi dan proses klasik dari kalangan E-government dapat meningkatkan pelayanan yang berbelit-belit dan E-government dapat menawarkan juga informasi di tingkat lokal.

Saat ini walaupun pemerintah desa dermaji telah menerapkan e-government namun lebih banyak untuk peningkatan pelayanan melalui penghapusan struktur birokrasi yang lama dan rumit. Sistem Informasi Eksekutif adalah salah satu tipe sistem informasi bagi eksekutif yang ditujukan untuk memfasilitasi kebutuhan informasi guna tercapainya tujuan suatu organisasi. Dalam penerapan sistem ini seringkali dimanfaatkan oleh pemerintah desa sebagai sumber informasi utama dalam mendukung pengambilan keputusan, terutama pada saat penyusunan anggaran yang lemah dalam hal mekanisme dan juga sumber data pendukung. Diharapkan dengan sistem informasi eksekutif ini pengambilan keputusan dalam penyusunan anggaran menjadi lebih obyektif. Metode pengembangan sistem pada penelitian ini adalah menggunakan Scrum.

Kata kunci: E-government, scrum

1. PENDAHULUAN

Dengan disahkannya UU No. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Dana Desa mulai dikucurkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2015. Dana ini di-harapkan agar dimanfaatkan

oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa ini diharapkan mampu mengangkat daerah yang sifatnya susah untuk berkembang sehingga

mampu mengejar ketertinggalannya dari daerah lain¹.

Kebijakan Dana Desa, terus meningkat yakni Rp20,67 triliun tahun 2015, Rp46,98 triliun tahun 2016, serta masing-masing Rp60 triliun pada tahun 2017 dan 2018². Dengan begitu banyaknya dana yang dikucurkan ke Desa-desanya maka tentunya tanggung jawab yang dipikul oleh pemerintah Desa menjadi besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Lebih jauh lagi untuk dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat maka pemerintah desa tentu juga harus dapat secara baik merencanakan kegiatannya yang memang tepat sasaran dan memang dibutuhkan oleh masyarakat desanya. Tahap perencanaan dan penganggaran di Desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Tidak hanya dalam penganggaran, pemerintah desa juga harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau paling tidak melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya. Hal ini sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Dalam mekanisme penganggaran yang dilakukan di Desa Dermaji seringkali musyawarah desa yang dilakukan dalam proses penyusunan

anggaran baik di tingkat RT, RW, Dusun dan Desa kurang didukung dengan data yang valid. Data yang dibutuhkan sebagai pendukung dalam menyusun anggaran yang terdapat di pemerintah desa biasanya kurang mutakhir dan juga karena dibutuhkan waktu yang lama untuk mengklasifikasi dan menyusunnya menjadi sebuah laporan maka seringkali belum tersedia sebagai data pendukung saat dilakukan musyawarah.

Penggunaan Teknologi informasi dalam hal ini adalah e-government pada pemerintahan di Indonesia sebagaimana menjadi amanah dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 telah diimplementasikan melalui kebijakan e-government pemerintah daerah dengan variasi yang disesuaikan dengan local resources dan kebutuhan daerah. Pentingnya e-government paling tidak disebabkan oleh 3(tiga) factor[1], yaitu: Komunikasi elektronik antara sektor publik dan masyarakat menawarkan bagi keduanya bentuk baru untuk partisipasi dan interaksi; Ruang cyber dalam pelayanan public memudahkan penghapusan struktur birokrasi dan proses klasik dari kalangan E-government dapat meningkatkan pelayanan yang berbelit-belit dan E-government dapat menawarkan juga informasi di tingkat lokal. Saat ini walaupun pemerintah desa Dermaji telah menerapkan e-government namun lebih banyak untuk peningkatan pelayanan melalui penghapusan struktur birokrasi yang lama dan rumit. Untuk penerapan e-government yang ada saat ini lebih diarahkan sebagai alat pemantau kinerja dan juga sebagai sistem yang dapat membantu pihak pemerintah desa dalam mengambil keputusan.

Sistem Informasi Eksekutif adalah salah satu tipe sistem informasi berbasis komputer yang ditujukan untuk memfasilitasi kebutuhan informasi

yang berkaitan dengan tercapainya tujuan suatu organisasi bagi eksekutif[2]. Dalam penerapan sistem ini seringkali dimanfaatkan oleh pemerintah desa sebagai sumber informasi utama dalam pengambilan keputusan, terutama pada saat penyusunan anggaran. Diharapkan dengan sistem informasi eksekutif ini pengambilan keputusan dalam penyusunan anggaran menjadi lebih obyektif.

Dengan tingkat penetrasi internet yang sudah semakin tinggi di desa-desa maka hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa dengan melakukan pemberdayaan bagi masyarakatnya untuk dapat berkontribusi dalam penyampaian informasi bagi pemerintah desa. Demikian juga tingkat penggunaan aplikasi selular di desa-desa juga sudah tinggi, hal inilah yang selanjutnya dapat dikombinasikan untuk dimanfaatkan dalam kontribusi ke dalam e-government sistem. Selain itu proses pengintegrasian informasi juga harus dilakukan untuk mengambil informasi dari sistem informasi yang sudah ada dan berjalan sebelumnya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengintegrasian sistem yang ada di lingkungan pemdes dengan memanfaatkan teknologi web service dan aplikasi selular yang selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah system informasi eksekutif dengan mengambil judul "SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF SEBAGAI PENDUKUNG PENGANGGARAN DI PEMERINTAH DESA MELALUI INTEGRASI SISTEM DENGAN TEKNOLOGI WEB SERVICE DAN APLIKASI SELULER (STUDI KASUS DESA DERMAJI)".

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat penulis

rumuskan permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana Sistem Informasi Eksekutif dapat membantu proses penganggaran serta Sistem Informasi Eksekutif seperti apakah yang tepat untuk membantu mekanisme penganggaran. Selanjutnya dalam penelitian ini pembahasan akan meliputi bagaimana SIE dapat membantu mekanisme penyusunan anggaran di Desa Dermaji Kecamatan Lumir, dengan tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengembangkan sistem informasi eksekutif yang tepat untuk digunakan dalam membantu proses pengambilan keputusan penyusunan anggaran desa.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan studi kasus. Studi literatur digunakan untuk membuat kajian sistem informasi eksekutif, mekanisme penganggaran, dan visualisasi informasi, sedang studi kasus dilakukan di Desa Dermaji Kecamatan Lumir dengan mengadopsi pendekatan pengembangan perangkat lunak *Agile*.

1. Kerangka Penelitian

Gambar 1 menunjukkan tentang kerangka penelitian untuk sistem informasi eksekutif.

Spesifikasi dari langkah penelitian sebagai berikut:

a. Identifikasi Masalah

Penulis akan mencari, mengumpulkan dan mengelompokkan permasalahan di lapangan dalam tahap ini. Permasalahan yang diidentifikasi adalah dukungan untuk pengambilan keputusan melalui pemanfaatan SI dan TI.

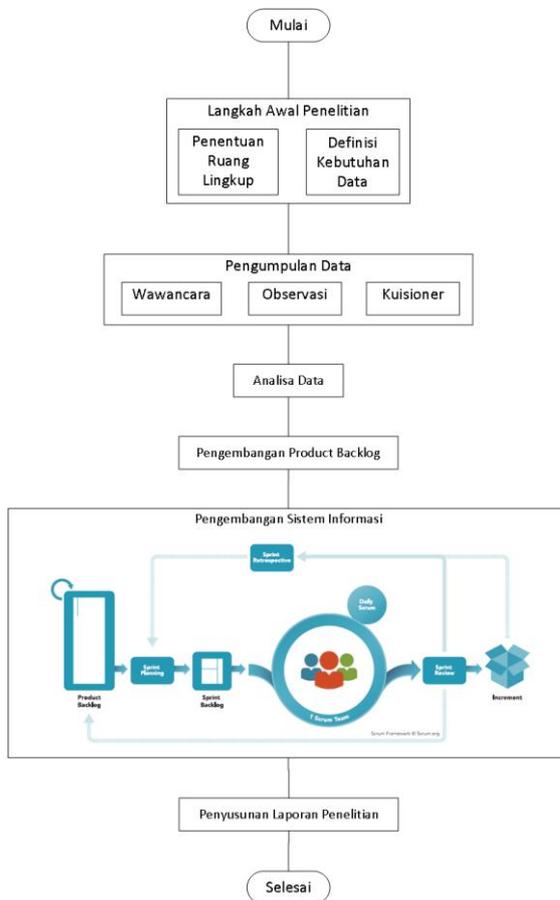
b. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data, penulis melibatkan beberapa sumber data yang

berkualitas. Sumber data terdiri dari:

1. Wawancara

Tahap wawancara bertujuan agar peneliti memperoleh data dan informasi langsung dari narasumber. Proses wawancara terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan jajaran Perangkat Desa. Hasil wawancara yang dilakukan kemudian dicatat sebagai salah satu sumber data yang digunakan dalam penelitian



Gambar 1. Kerangka Penelitian

2. Observasi

Observasi yang dilakukan dengan mengamati sistematis permasalahan yang terjadi pada perangkat desa, kepala desa dan sekretaris desa.

Tahap observasi dengan cara turun langsung ke lapangan agar peneliti dapat langsung menemui secara langsung permasalahan dan kendala yang dialami oleh objek penelitian.

3. Kuesioner

Pengumpulan data kuesioner untuk mendapatkan informasi dari responden tentang pengalaman dan keyakinan responden (Cardina, 2005). Kuesioner ini akan digunakan sebagai sumber data dalam penentuan kriteria dan subkriteria

2. Analisis Data

Data-data yang sudah didapat dari berbagai sumber, selanjutnya prosesnya diidentifikasi untuk mengetahui masalah terkait proses penganggaran dan dukungan SI/TI yang memungkinkan. ata yang terkumpul tersebut kemudian akan dianalisa untuk menghasilkan kesimpulan.

3. Pengembangan Product Backlog

Setelah mendapatkan hasil analisa data mengenai proses penganggaran selanjutnya disusun product backlog untuk dapat digunakan dalam mengembangkan sistem informasi eksekutif dengan menggunakan kerangka kerja pengembangan sistem *Agile*. yaitu SCRUM.

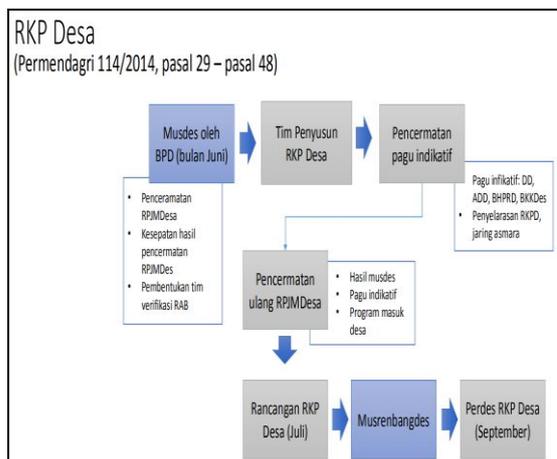
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dari metode yang sudah ditetapkan sebelumnya dapat disampaikan dalam beberapa langkah.

1. Penentuan Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini ditentukan dengan penelusuran literatur.

Penelitian ini menitikberatkan pada dukungan yang dapat diberikan oleh sistem informasi eksekutif pada proses.penganggaran. Proses penyusunan anggaran / RKP desa yang dilaksanakan tiap tahun adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Ruang Lingkup

Jadi dalam penelitian ini proses pengembangan sistem informasi eksekutif akan dititik beratkan pada proses penganggaran di Desa.

2. Definisi Kebutuhan Data

Dari hasil wawancara dan observasi dengan pemerintah desa Dermaji beserta masyarakat desa Dermaji ada beberapa data yang diambil sesuai dengan pendefinisian kebutuhan datanya. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang menitikberatkan peran sistem informasi eksekutif dalam membantu mekanisme penganggaran di desa maka data yang dibutuhkan dapat dikelompokkan menjadi :

- ❖ Data unit organisasi yang terlibat dalam mekanisme penganggaran.

- ❖ Data proses atau notasi model bisnis penganggaran desa.
- ❖ Data format dan isi anggaran desa.

3. Analisa Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dilakukan proses analisa untuk menghasilkan beberapa hal yaitu :

- ❖ Menentukan aktor atau pengguna sistem informasi Data unit organisasi yang terlibat dalam mekanisme penganggaran diperoleh :

- Kepala Desa
- BPD
- Perangkat Desa
- Ketua RT
- Ketua RW
- Warga

- ❖ Dari data profil desa Dermaji yang memuat visi dan misi serta data mekanisme penganggaran selanjutnya disusun visi produk sistem informasi yang akan kita kembangkan. Visi produk SIE Anggaran Desa Dermaji yaitu :

Untuk pemdes yang ingin menyusun anggaran tahunan serta menangkap aspirasi-aspirasi yang diberikan oleh masyarakat dan masyarakat yang ingin mencurahkan aspirasi pembangunan ke pemdes. Pakkades.id adalah sistem untuk penyusunan anggaran untuk menampung aspirasi masyarakat desa yang dapat memudahkan dalam penyediaan data pendukung

pada mekanisme penyusunan anggaran dan rekap data historis. Tidak seperti aplikasi lain yang hanya fokus dalam penyusunan anggaran, pakkades.id fokus pada bagaimana menyediakan data pendukung mekanisme dalam penyusunan anggaran dengan cara penangkapan aspirasi dari masyarakat dan ketersediaan data historis.

4. Pengembangan *Product Backlog*

Selanjutnya dari visi produk dan juga aktor yang ada di dalam sistem dikembangkan backlog atau user stories sebagai dasar dalam kerangka kerja pengembangan menggunakan SCRUM.

Sebagai RT dan RW saya ingin mendapatkan data sebagai bahan musyawarah sehingga saya dapat mengusulkan yang benar-benar keinginan warga

Sebagai BPD saya ingin dapat menentukan anggaran atas aspirasi yang sudah diajukan berdasarkan peraturan yang sudah ada, prosentase anggaran per RT, serta data historis sehingga ada pemerataan dalam pembangunan desa

Sebagai masyarakat saya ingin dapat menyampaikan aspirasi saya secara langsung sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan anggaran desa /APBDes

Sebagai Perangkat Desa saya ingin dapat memverifikasi anggaran sehingga anggaran yang tersusun menjadi valid

Sebagai masyarakat saya ingin melihat data aspirasi lainnya yang masuk berdasarkan wilayah yang sama dengan saya sehingga saya dapat memberikan dukungan atau ketidaksetujuan atas suatu aspirasi

Sebagai Perangkat Desa saya ingin dapat menyusun anggaran dengan menginputkan aspirasi yang sudah disampaikan dalam musyawarah desa sehingga tersusun anggaran desa konsolidasi dan anggaran per wilayah

Sebagai Perangkat Desa saya ingin dapat memvalidasi kesesuaian bidang dan sub bidang dengan isi aspirasi yang disampaikan oleh warga sehingga isi aspirasi dan bidang serta sub bidang menjadi valid

Gambar 3. Product Backlog

5. Pengembangan Sistem Informasi

Proses pengembangan sistem informasi dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja SCRUM, dimana dalam pengembangan menggunakan kerangka kerja ini yang pertama dilakukan oleh tim pengembang adalah memilah Product Backlog terlebih dahulu. Proses pemilahan yang dilakukan disini adalah dengan menentukan tingkat kesulitan penyelesaian dan juga selanjutnya membuat skala prioritas penyelesaian dengan menjadikannya sebagai sprint.

Selanjutnya setelah ditentukan sprint dari product backlog, developer menyusun definition of done untuk diketahui oleh product owner. Setelah itu membuat PBI (Product Backlog Item) sebagai berikut :

The image shows a collection of yellow sticky notes representing Product Backlog Items (PBIs) for a village information system. The notes are arranged in a grid and describe various tasks such as login/register, database setup, and UI development for different devices and data types.

- Login & Register berdasarkan KTP UI aplikasi selular
- UI aplikasi selular login RT dan RW dan lihat data aspirasi
- database dan API login RT dan RW dan lihat data aspirasi
- Database dan backend login dan register aplikasi selular dan Web
- Library pemberian dukungan
- Database, backend dan API input data aspirasi
- UI Aplikasi Selular pemberian dukungan dan tidak
- Database dan API pemberian dukungan dan tidak
- UI aplikasi selular login RT dan RW dan lihat data aspirasi
- database dan API login RT dan RW dan lihat data aspirasi
- UI aplikasi Web login RT dan RW dan lihat data aspirasi
- UI aplikasi Web login BPD dan lihat data aspirasi
- Database dan API login BPD dan lihat data aspirasi
- UI aplikasi web login dan data master anggaran, RT dan RW
- Database dan function login dan data master anggaran, RT dan RW
- Database dan function input data anggaran dan perubahan
- UI aplikasi web input data anggaran dan perubahan



Gambar 4. Product Backlog Item

Sebagai alat untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam proses pengembangan maka dibuat sebuah diagram untuk melakukan hal tersebut seperti tampak dalam gambar

4. KESIMPULAN

Telah dibuat system informasi eksekutif untuk penganggaran desa dermaji.

5. SARAN

Untuk penelitian selanjutnya dilakukan evaluasi perapan system informasi tersebut

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih untuk Universitas Amikom Purwokerto

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 16 No. 1, Februari 2016: 37 - 45
- [2]. www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/.
- [3]. Kartika, R. (2015). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TEGESWETAN DAN DESA JANGKRIKAN KECAMATAN KEPIL KABUPATEN WONOSOBO. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4(3), 179-188. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.179-188>
- [4]. Akibat Pemilu, Penyerapan Dana Desa Kuartal I/2019 Baru 17 Persen: *Ekonomi. Bisnis.com*, ekonomi.bisnis.com/read/20190429/9/916904/akibat-pemilu-penyerapan-dana-desa-kuartal-i2019-baru-17-persen.